



---

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2015-2019**

**Ni Putu Ferbilia Sarlitawati<sup>1</sup> Made Kembar Sri Budhi<sup>2</sup>**

---

### *Abstract*

---

**Keywords:**

*Local government;  
Decentralization;  
Labor;  
Economic growth*

*The implementation of regional autonomy gives wider authority to regional governments to regulate their own regions according to their potential. Fiscal decentralization is a form of delegation of authority in order to support the implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the factors that influence the economic growth of districts/cities in Bali Province in 2015-2019. The data used in this study were sourced from secondary data. The analytical technique used is panel data regression analysis with the E-Views 9 program. The results of the study show that local revenue, balancing funds, capital expenditures and labor simultaneously have a significant effect on the economic growth of districts/cities in Bali Province in 2015-2019. Partially Local Original Income, capital expenditures and labor have no significant effect on the economic growth of districts/cities in Bali Province. Meanwhile, the balancing fund has a positive and significant impact on the economic growth of districts/cities in Bali Province in 2015-2019.*

---

**Kata Kunci:**

*Pemerintah Daerah;  
Desentralisasi;  
Tenaga Kerja;  
Pertumbuhan Ekonomi*

---

**Abstrak**

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk pendelegasian wewenang dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan program E-Views 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, belanja modal dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.

---

**Koresponding:**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Bali,  
Indonesia  
Email: pferbilia@gmail.com*

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000, Indonesia mulai menganut sistem otonomi daerah yang kini sudah berubah menjadi desentralisasi. Adanya otonomi daerah maka kepala daerah memiliki wewenang yang luas dan fleksibel dalam mengembangkan daerahnya (Chandra, 2017). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Haryanto (2013) mengemukakan bahwa perekonomian negara dikatakan bertumbuh apabila jumlah balas jasa riil lebih besar terhadap penggunaan faktor produksi tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dicerminkan dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2020) tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup pesat dari angka 5,56 persen pada tahun 2017 menjadi 6,31 persen pada tahun 2018. Sementara tahun 2019 mengalami penurunan hingga 5,60 persen.

Menurut ahli ekonomi klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Teori ekonomi klasik oleh Adam Smith menyebutkan bahwa dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2010). Pertumbuhan *output* total terdiri sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia dan akumulasi modal. Salah satu sumber modal dalam pembangunan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pembiayaan yang dilakukan dari PAD merupakan salah satu bentuk terlaksananya desentralisasi fiskal atau bentuk pendelegasian tugas dan kewenangan dalam pengambilan keputusan bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan dan pengeluaran (Fajri et al, 2016).

Menurut informasi yang diperoleh dari BPS (2020) kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki angka PAD yang kian meningkat tiap tahunnya. Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan pendapatan tertinggi yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan sumber daya dengan optimal sehingga dapat penerimaan yang diperoleh mencukupi pembiayaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan pendapat Irvan dan Karmini (2016) bahwa dengan penerimaan PAD yang tinggi maka pemerintah daerah berperan penting dalam pengoptimalan potensi daerahnya. Namun, penerimaan PAD yang berbeda di tiap kabupaten/kota menjadi tugas pemerintah pusat untuk membantu pendanaan daerah melalui dana transfer yaitu dana perimbangan. Alokasi dana transfer biasanya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah (Kim & Samudro, 2016).

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali (2020), kabupaten dengan anggaran dana perimbangan terbesar adalah Kabupaten Buleleng sebesar Rp1.331.020.352.000,00 pada tahun 2019 kemudian disusul oleh Kabupaten Tabanan dan Karangasem. Sedangkan daerah dengan transfer dana terendah dari pemerintah pusat yaitu Kabupaten Badung karena PAD yang diterima kabupaten ini terbesar di Provinsi Bali pada tahun 2019. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima menunjukkan bahwa potensi daerah mengembangkan sumber daya potensial daerahnya rendah sehingga dibutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah, salah satunya dalam membiayai anggaran belanja daerah yaitu belanja modal. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan infrastruktur sarana dan prasarana daerah. Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rarun (2019) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang meningkat maka akan memperluas pasar sehingga akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian (Adipuryanti, 2015). Tenaga kerja yang tinggi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila lapangan kerja yang tersedia

dapat menyerap tenaga kerja, sehingga akan mengurangi pengangguran. Sarwono (2016) menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang memiliki pekerjaan akan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi makro dari itu dibutuhkan keseimbangan penggunaan tenaga kerja (Ningrum, 2018). Pemerintah baik kabupaten maupun provinsi harus tetap mampu mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, pengalokasian belanja modal dan peningkatan partisipasi tenaga kerja sebagai modal pembangunan daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:  $H_1$  : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2015-2019.  $H_2$  : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2015-2019

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Pemilihan lokasi di Sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali didasarkan pada potensi PAD yang besar tetapi masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, Bali juga sedang gencar melakukan pembangunan yang terlihat dari usaha pengalokasian belanja pemerintah melalui belanja modal serta usaha agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja yang ada sehingga dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019 yang diukur dalam satuan persen. Data penelitian diperoleh dari data sekunder melalui *website* resmi Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, artikel, skripsi, dan buku bacaan sehingga metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan observasi non-partisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung (Hasanah, 2017). Data penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Adapun persamaan regresinya yaitu:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

$i$  = 1, 2, ..., N

$t$  = 1, 2, ..., T

$Y$  = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali

$X_2$  = Dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Bali

$X_3$  = Belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali

$X_4$  = Tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi variable bebas

$\mu$  = *Error*

Merujuk model persamaan umum di atas, maka dapat dituliskan model untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \text{Log}\beta_1 X_{1it} + \text{Log}\beta_2 X_{2it} + \text{Log}\beta_3 X_{3it} + \text{Log}\beta_4 X_{4it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Langkah pengujian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: melakukan pengujian metode estimasi data panel, uji pemilihan model, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), kemudian uji hipotesis secara simultan dan parsial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian model regresi data panel dengan Uji Chow diperoleh probabilitas *Chi-square* senilai 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan Uji Chow maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Kemudian hasil Uji Hausman yang dilakukan diperoleh nilai probabilitas *Cross-section* senilai 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan Uji Hausman maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengujian regresi dengan bantuan aplikasi e-views 9, disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	46.90898	7.235198	6.483440	0.0000
LOGX1_PAD	-1.097072	0.164823	-6.656066	0.0000
LOGX2_DP	0.423345	0.213706	1.980974	0.0492
LOGX3_BM	-0.098937	0.079175	-1.249606	0.2132
LOGX4_TK	-1.681467	0.600609	-2.799601	0.0057
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.515108	Mean dependent var		5.859111
Adjusted R-squared	0.480266	S.D. dependent var		0.435662
S.E. of regression	0.314080	Akaike info criterion		0.591142
Sum squared resid	16.47389	Schwarz criterion		0.821744
Log likelihood	-40.20274	Hannan-Quinn criter.		0.684641
F-statistic	14.78390	Durbin-Watson stat		0.336747
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 46,90898 - 1,097072\text{LOGX1\_PAD} + 0,423345\text{LOGX2\_DP} - 0,098937\text{LOGX3\_BM} - 1,681467\text{LOGX4\_TK}$$

$$\text{Se} = (7,235198) \quad (0,164823) \quad (0,213706) \quad (0,079175) \\ (0,600609)$$

$$t_{\text{stat}} = (6,483440) \quad (-6,656066) \quad (1,980974) \quad (-1,249606) \\ (-2,799601)$$

$$\text{Prob} = (0,0000) \quad (0,0000) \quad (0,0492) \quad (0,2132) \\ (0,0057)$$

$$R^2 = 0,515108$$

$$F_{\text{hitung}} = 14,78390$$

Uji multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien masing-masing variabel jika lebih rendah dari 0,80 maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Hasil pengujian diperoleh bahwa hasil perhitungan nilai pada kolom koefisien tiap variabel lebih rendah dari 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi.

Pengujian ini dilakukan dengan metode *Breusch Pagan-Godfrey* pada e-views 9 dengan membandingkan nilai  $X^2_{hitung}$  dengan  $X^2_{tabel}$ . Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa  $X^2_{hitung}$  sebesar 1,055182 lebih kecil daripada  $X^2_{tabel}$  sebesar 9,49, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dengan kata lain data bersifat homoskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa nilai Durbin Watson sebesar  $0,336747 < dL$  dimana nilai  $dL$  sebesar 1,7109 sehingga dapat disimpulkan terjadi autokorelasi positif dalam model

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *probability F-statistic* adalah 0,000000 lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, belanja modal dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Nilai adjusted r square sebesar 0,48 memiliki arti bahwa 48 persen variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, belanja modal dan tenaga kerja. Sementara sisanya sebesar 52 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -1,097072 dengan nilai *probability* sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya PAD secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamuka (2019) dan Prakarsa & Noor (2014).

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Penerimaan dari sumber tersebut ternyata menyebabkan pendapatan dari berbagai sektor pendapatan yang terlihat dari PDRB kabupaten/kota kurang maksimal (Dewi & Suputra, 2017). Hal ini dikarenakan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat karena harus melunasi kewajiban perpajakannya sehingga akan mengganggu roda perekonomian. Disamping itu, pemerintah yang kurang dapat mengalokasikan sumber pendapatan dengan baik menyebabkan kontribusi PAD pada pertumbuhan ekonomi kurang maksimal. Menurut Prakarsa (2014) peraturan atau kebijakan yang tidak efektif menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi positif antara pengutan yang dilakukan dengan peningkatan mutu layanan public yang diberikan. Perusahaan daerah yang turut menanggung pembebanan biaya juga berdampak pada alokasi PAD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah menjadi berkurang.

Hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,423345 dengan nilai *probability* sebesar  $0,0492 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Nilai koefisien sebesar 0,423345 menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan ( $X_2$ ) mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,0042 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Sutrisna (2018) dan Yushkov (2015).

Dana perimbangan yang diterima daerah yang semakin besar menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana dari pusat dan belum dapat memaksimalkan potensi sumber daya

daerahnya sebagai sumber pendanaan daerah. Yushkov (2015) menyebutkan bahwa daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat akan lebih terhindar dari adanya krisis keuangan dan ekonomi. Meski tingkat kemandirian daerah rendah namun ketika pembangunan daerah berjalan maksimal menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat digunakan dan dialokasikan dengan baik. Pembangunan daerah yang berjalan dengan baik akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga lambat laun akan meningkatkan kemandirian daerah.

Dana perimbangan pada dasarnya diberikan untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan potensi PAD masing-masing daerah yang tentunya berbeda akan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam proses pembangunan daerah. Makadari itu, pemberian dana perimbangan akan mendorong proses pembangunan secara maksimal sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terjadi di Provinsi Bali, kabupaten yang menerima dana perimbangan dalam jumlah besar yaitu Kabupaten Buleleng, Tabanan, dan Karangasem. Hal ini dikarenakan PAD yang dihasilkan ketiga kabupaten tersebut masih terbilang rendah sehingga diperlukan dana perimbangan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan kondisi perekonomian daerah membaik. Sementara penerima dana perimbangan terendah adalah Kabupaten Badung karena PAD yang diperoleh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Apabila semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pendapatan daerah dan pada akhirnya akan berdampak positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Cahyono, 2019).

Hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $-0,098937$  dengan nilai *probability* sebesar  $0,2132 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya belanja modal secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Belanja modal yang dilakukan pemerintah dilakukan untuk pembangunan dan perbaikan berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hasil pengujian yang tidak signifikan disebabkan karena pengalokasian belanja modal yang belum optimal sehingga belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dilakukan oleh Fajri (2016) dan Apriana & Suyanto (2010).

Belanja modal dalam penyediaan infrastruktur public yang belum merata di tiap daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat sehingga belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengadaan infrastruktur yang masih dalam proses yang menyebabkan masyarakat belum dapat merasakan manfaatnya secara maksimal (Dewi dan Suputra, 2017). Kegiatan belanja modal yang tidak merata dan kurang maksimal berdampak pada peningkatan pengeluaran pemerintah namun tidak beriringan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, realisasi anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran berupa belanja modal masih jauh lebih rendah daripada pengeluaran untuk belanja lainnya sehingga dampak dari anggaran belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi relatif masih kecil.

Hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $-1,681467$  dengan nilai *probability* sebesar  $0,0057 < 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramayani (2012), Mokomdompis (2015), serta Ningsih & Sari (2018).

Hasil tidak signifikan dapat disebabkan karena rendahnya kualitas tenaga kerja meskipun jumlah tenaga yang terserap terus mengalami peningkatan yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja

rendah dan output yang dihasilkan tidak mengalami perubahan. Ramayani (2012) berpendapat bahwa jumlah tenaga kerja yang meningkat bila tidak sejalan dengan peningkatan kualitasnya maka akan menyebabkan pemborosan input yang pada akhirnya akan mengurangi output dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Mokodompis (2015) menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang tersedia memiliki pendidikan dan ketrampilan yang rendah sehingga tidak dapat bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuannya.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja yang bekerja masih didominasi oleh tenaga kerja yang tidak tamat sekolah hingga SMA sebanyak 82 persen (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pendidikan yang rendah sehingga kurangnya kemampuan dan kesadaran kerja. Karena rendahnya tingkat pendidikan serta penempatan posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian tenaga kerja itu sendiri akan berdampak pada rendahnya produktivitas sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, belanja modal dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan, dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka dapat diajukan saran bagi pemerintah daerah diharapkan agar lebih optimal dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga potensi daerah yang tercermin dalam PAD dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah karena PAD juga sekaligus sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Penerimaan PAD terutama yang bersumber pajak dan retribusi hendaknya dialokasikan seefektif dan seefisien mungkin agar dana yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi tersebut mampu dengan cepat menghasilkan *output* guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dikarenakan berkurangnya pendapatan untuk konsumsi karena adanya pembayaran pajak maka diharapkan adanya kebijakan pemberian subsidi sebagai stimulus dalam perekonomian agar daya beli serta tingkat konsumsi masyarakat bertambah yang pada akhirnya roda perekonomian dapat berjalan serta pemerintah juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengalokasian dan pemanfaatan dana perimbangan guna melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan sehingga dapat terus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkat dikarenakan adanya pembangunan yang berjalan lancar. Kemudian berkaitan dengan belanja modal, dimana belanja ini merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat bersentuhan dengan kepentingan publik sehingga diharapkan agar realisasi anggaran untuk belanja modal dapat ditingkatkan dan pembangunan infrastruktur lebih merata di seluruh daerah guna mempercepat perputaran roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat peningkatan jumlah tenaga kerja sebaiknya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya agar mampu bersaing dalam dunia kerja dan meningkatkan

produktivitas kerja sehingga dapat menghasilkan *output* yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti program pendidikan atau pelatihan keterampilan yang sesuai dengan spesialisasi yang ditempati oleh tenaga kerja, karena sesuai dengan teori *human capital* investasi yang cukup untuk manusia akan mampu menghasilkan ekonomi yang tumbuh. Peningkatan tenaga kerja baik dari segi kuantitas dan kualitas dengan dibarengi penyediaan lapangan kerja yang memadai merupakan modal besar bagi pembangunan daerah sehingga diharapkan adanya upaya yang bersinergi antara pemerintah melalui penyediaan berbagai bantuan program pendidikan dan masyarakat melalui tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah atau menggunakan variabel lainnya dan memperpanjang periode penelitian sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.

## REFERENSI

- Adipuryanti, N. L. P. Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 11(1), 20-28.
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68-79.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). *PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010*. Bali: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2015-2019*. Bali: BPS
- Cahyono, E., Adzim, A., & Mughtar. (2019). Pengaruh Penerimaan daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019. *Journal of Public Power*, 3(1), 38-50.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67-76.
- Dewi, N. W. R & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745-1773.
- Fajri, Ahmad. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29-35.
- Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. V. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 99-107.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 1-12.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dngan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(3), 338-362.
- Kim, E., & Samudro, Y. N. (2016). The impact of intergovernmental transfer funds on interregional income disparity in Indonesia. *International Journal of Urban Sciences*, 21(1), 22-40.
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 118-128.
- Mokodompis, R., Rumat, V., & Maramis, M. (2015). Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota Manado Tahun 2003-2012). *Jurnal Berkala Efisiensi*, 15(1), 73-83.
- Ningrum, P. N. C., & Indrajaya, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendidikan, Penanaman Modal Asing, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas*

- Udayana*, 7(2), 22-30.
- Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(1), 21-31.
- Prakarsa, F.D & Noor, I. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Ramayani, Citra. (2012). Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 41-54.
- Rarun, K., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Kota-Kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 1-13.
- Rosita, I. A. P. M., & Sutrisna, I. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(7), 1445-1471.
- Sarwono. (2016). Analysis of Economic Growth Factors in West Pantura Areas of Central Java. *Journal of Economics and Policy*, 9(1), 145-158.
- Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404-418.